

Judul : Pemborosan, perluasan ruang kerja DPR
Tanggal : Jumat, 14 Juni 2019
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 2

Pemborosan, Perluasan Ruang Kerja DPR

JAKARTA - Permintaan perluasan ruang kerja anggota DPR ke Menteri Keuangan (Menkeu) dikritik. Pasalnya, dianggap sebagai pemborosan dan tidak mendesak.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Lucius Karus menilai, perluasan ruang kerja anggota DPR merupakan pemborosan anggaran. Sebab itu, menurut dia, wacana ini sebaiknya tak dire-

alisasikan. "Pemborosan

itu pasti. Karena ha-

rus mengeluarkan

anggaran untuk

sesuatu yang

tidak sangat

mendesak,"

ujarnya kepada

wartawan, Ka-

mis (13/6).

Lucius menga-

takan, jika anggota

dewan membutuhkan ru-

ang kerja lebih luas untuk rapat, mereka bisa

menggunakan ruangan fraksi atau komisi.

Selain itu, menurut Lucius, sebagai wakil

rakyat, seharusnya anggota DPR mengerti

dengan kondisi perekonomian yang sulit

dan menipisnya keuangan negara. "DPR

masih bisa bekerja layak dengan satu meja

plus kursi yang bagus. Kan untuk urusan

lain semisal menerima warga dari dapil,

bisa menggunakan ruang-ruangan

yang lebih besar di DPR," ucapnya.

Lucius menyatakan, persoalan ruang

kerja pribadi anggota DPR yang diang-

gap sempit sudah jadi masalah klasik.

Dia menuding banyak anggota dewan

mendambakan fasilitas mewah sehing-

ga perombakan ruang kerja DPR terus-

menerus direncanakan.

"Tapi, apa yang terjadi? Setiap kali

mereka mulai merencanakan, sejak saat

itu juga publik menolak. Dalam urusan

permintaan fasilitas bagi anggota DPR,

publik selalu saja nyaris kompak me-

nyatakan penolakan," kata Lucius.

Padahal, kata dia, walaupun ruang kerja

anggota DPR diperluas, tidak jaminan

kualitas kinerja mereka akan membaik.

Apalagi, dia menuding anggota DPR be-

lum menunjukkan perbaikan kinerja baik

secara kualitas maupun kuantitas.

"Ditambah lagi dengan banyaknya kasus

korupsi yang terjadi, DPR praktis masih

sulit untuk dipercaya. Ketidakpercayaan

ini tentu saja juga muncul ketika mer-

eka meminta fasilitas baru justru di saat

mereka gagal meyakinkan publik melalui

kinerja mereka," ujar Lucius.



Lucius Karus

TWITTER



Dia menambahkan, seharusnya dengan ruangan yang sudah tersedia saat ini, anggota DPR dapat menghasilkan banyak hal. “Tetapi mental mereka yang manja tentu saja tak banyak berubah pun kalau fasilitas ruangan menjadi lebih besar,” kata dia.

Sebelumnya, anggaran pembangunan gedung dikeluhkan para anggota DPR RI. Pasalnya, ukuran kantor hanya 4×6 meter persegi dan diisi oleh delapan orang. Hal itu dilayangkan Menkeu Sri Mulyani Indrawati saat rapat membahas rancangan APBN 2020.

Anggota Fraksi Golkar DPR John Kenedy Aziz mengatakan, para anggota dewan mengeluhkan keadaan kantor hingga infrastruktur di daerah yang dinilai kurang mendapat perhatian.

Menurut John, ukuran kantor DPR yang hanya berukuran 4×6 meter persegi. Ruang itu bahkan diisi oleh delapan orang yang terdiri dari anggota DPR, tenaga ahli dan asisten pribadi.

“Kami sangat senang bila Ibu berkenan berkunjung ke ruangan kami yang lebih kecil dari ruangan kepala kelurahan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (12/6). (aen)